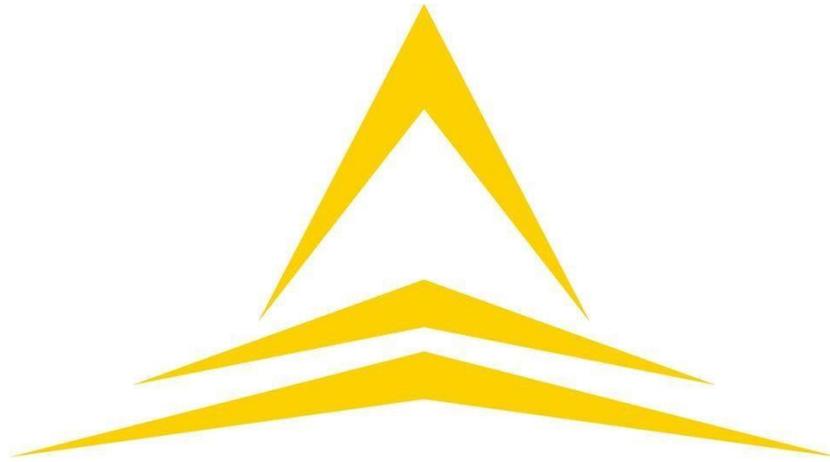


**PENDIDIKAN POLITIK OLEH PARTAI POLITIK ISLAM
DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK
PEMILIH PEMULA DI KABUPATEN PURBALINGGA**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

IAIN PURWOKERTO

Oleh:

**LUQMAN ADI PRASETYO
NIM. 1617303022**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
JURUSAN HUKUM PIDANA DAN POLITIK ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2021**

**“PENDIDIKAN POLITIK OLEH PARTAI POLITIK ISLAM DALAM
MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA DI
KABUPATEN PURBALINGGA”**

ABSTRAK

**Luqman Adi Prasetyo
NIM. 1617303022**

**Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Program Studi Hukum Tata
Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

Pendidikan politik merupakan alat untuk meningkatkan partisipasi politik. Salah satu kelemahan partai politik Islam (PPP, PBB, PKS) adalah kurang memberikan komunikasi politik kepada masyarakat dalam meningkatkan partisipasi politik. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan membahas tentang bentuk kegiatan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik Islam serta mengetahui upaya partai politik Islam dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula melalui pendidikan politik.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*). Data primer yang digunakan berasal dari wawancara dengan pengurus bidang pengkaderan atau anggota DPRD Kabupaten Purbalingga dari partai politik Islam dan wawancara dengan pengurus KPU Kabupaten Purbalingga bagian pengelolaan data. Data sekundernya berupa PKPU Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Dengan menggunakan metode *juridis sosiologis*, untuk memperoleh analisis dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwa partai politik Islam formalis sudah melakukan pendidikan politik kepada pemilih pemula. Namun partisipasi politik masih mengalami penurunan. Upaya yang dilakukan oleh partai politik Islam formalis untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula yaitu dengan mengemas pendidikan politik yang menarik dan menjawab minat bakat pemilih pemula. Selain itu kolaborasi partai politik Islam dengan partai nasionalis dibutuhkan untuk meningkatkan suara partai.

Kata kunci: partai politik Islam, pendidikan politik, pemilih pemula.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR.....	xii
ABSTRAK	xv
MOTTO	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR SINGKATAN.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I : Pendahuluan	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	13
C. Rumusan Masalah.....	15
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	15
E. Kajian Pustaka	16
F. Sistematika Pembahasan.....	21

BAB II : Telaah Pustaka

A. Pendidikan Politik.....	22
1. Definisi pendidikan politik	22
2. Tujuan dan Manfaat pendidikan politik.....	25
3. Macam-macam pendidikan politik.....	27
4. Pendidikan politik dalam Islam	29
B. Partisipasi Politik	31
1. Definisi Partisipasi Politik	31
2. Bentuk dan Model Partisipasi Politik.....	33
3. Partisipasi Politik Pemilih Pemula.....	37
C. Partai Politik.....	39
1. Definisi partai politik	39
2. Jenis-jenis partai politik	42
3. Tujuan dan fungsi Partai Politik	45
4. Partai Politik Islam di Indonesia	54

BAB III : Metode Penelitian

A. Jenis penelitian.....	57
B. Sumber Data	58
C. Metode Pengumpulan Data.....	59
D. Metode Analisis Data.....	62

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Hasil Pendidikan Politik Partai Politik Islam di Kabupaten Purbalingga	64
--	----

1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP).....	65
a. Gambaran Umum PPP	65
b. Sasaran dan manfaat pendidikan politik PPP.....	69
c. Bentuk Kegiatan Pendidikan Politik PPP	70
2. Partai Bulan Bintang (PBB).....	71
a. Gambaran umum PBB	71
b. Sasaran dan mafaat pendidikan politik PBB	76
c. Bentuk kegiatan pendidikan politik PBB	76
3. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	77
a. Gambaran umum PKS	77
b. Sasaran dan manfaat pendidikan politik PKS	82
c. Bentuk kagiatan pendidikan politik PKS	83
B. Upaya partai politik Islam dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula melalui pendidikan politik	85
1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP).....	85
2. Partai Bulan Bintang (PBB).....	87
3. Partai Keadilan Sejahtera (PKS).....	88

BAB V : Penutup

A. Kesimpulan	93
B. Saran	94

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat atau dengan kata lain, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama, rakyat berkuasa, pemerintahan dan kekuasaan oleh rakyat. Demokrasi yang dianut di Indonesia yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila. Tetapi yang tidak dapat disangkal bahwa beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusional cukup jelas tersirat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang belum diamandemen, ditandai dengan penjelasan mengenai sistem pemerintahan negara yaitu negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*) dan pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi, tidak bersifat absolutisme atau kekuasaan yang tidak terbatas. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kenijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar merupakan corak khas demokrasi Indonesia.¹

Konsep kehidupan demokrasi Indonesia merupakan potongan dari demokrasi barat yang menekankan pada unsur kebebasan. Namun demikian demokrasi Pancasila memiliki ciri khusus yakni adanya musyawarah mufakat yang sesuai dengan ideologi negara. Musyawarah sendiri berawal dari sila keempat Pancasila. Musyawarah merupakan salah satu nilai luhur dari bangsa

¹ Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm 106.

Indonesia yang dikenal disemua daerah meskipun dengan istilah yang berbeda-beda, sehingga tidak salah jika musyawarah menjadi ciri utama dari demokrasi Pancasila. Musyawarah digunakan sebagai proses mempertemukan seluruh pihak untuk membahas suatu rencana merupakan langkah yang sangat ideal untuk mewujudkan suatu keputusan yang baik dan sejalan dengan kepentingan masyarakat. Demokrasi Indonesia lebih mengedepankan musyawarah mufakat yang dapat dilihat dari proses pengambilan keputusan baik di desa hingga pusat. Dengan adanya musyawarah ini secara langsung telah melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan berpolitik.

Keterlibatan masyarakat dalam kehidupan berpolitik, merupakan bagian dari keaktifan kegiatan politik untuk menentukan siapa yang diinginkan sebagai pemimpin dalam pemerintahan. Memilih pemimpin merupakan hak, bukan suatu kewajiban yang diwujudkan dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Sebuah prosedur yang cukup teruji dalam menentukan siapa pemegang kedaulatan yang dipilih rakyat menggunakan cara Pemilihan Umum. Oleh karena itu keberadaan lembaga-lembaga pemegang kedaulatan menjadi penentu masa depan negara Indonesia.² Pemilu dinilai sebagai sarana dan cermin perwujudan kembali hak dasar kedaulatan rakyat dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam melaksanakan rekrutmen pimpinan untuk mewujudkan demokrasi sampai pada tingkat lokal. Secara sederhana, pemilu adalah cara individu warga negara yang mendiami suatu

²Abdi Akbar, dkk., *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Partisipasi Masyarakat*, (Jakarta: BAWASLU, 2019), hlm 3.

daerah tertentu untuk melakukan kontrak politik dengan orang atau partai politik yang diberi mandat menjalankan sebagian hak kewarganegaraan pemilih. Ikut serta berperan dalam pemilu secara tidak langsung berperan dalam membangun pemerintahan yang demokratis.

Untuk terciptanya pemerintahan yang demokratis melalui pemilu, rakyat harus ikut berpartisipasi didalamnya. Partisipasi politik merupakan fungsi yang dimiliki partai politik untuk mendorong masyarakat agar aktif dalam kegiatan politik yang biasanya dilakukan melalui indoktrinasi ideologi, asas partai kepada anggota, masyarakat yang ada dalam jangkauan partainya.³ Sedangkan mewujudkan partisipasi politik yang berkualitas diperlukan adanya pendidikan politik. Pendidikan politik merupakan bentuk pendidikan orang dewasa yang diberikan kepada generasi muda, dengan jalan menyiapkan kader-kader politik untuk berkompetisi politik dan mendapatkan penyelesaian politik agar menang dalam perjuangan politik. Ini adalah pengertian pendidikan politik secara sempit, dan ditujukan kepada mereka yang merupakan kader partai atau kader politik. Dalam arti luas, pendidikan politik merupakan upaya pendidikan yang disengaja dan sistematis untuk membentuk individu yang berkepribadian politik, agar memiliki kesadaran politik dan mampu menjadi partisipan yang bertanggung jawab secara etis atau moral dalam mencapai tujuan politik masyarakat, bangsa, dan negara.⁴ Pendidikan politik pada prinsipnya membentuk karakter bangsa yang mampu melestarikan nilai-nilai yang dijunjung tinggi bersama sehingga dapat

³ A. Rahman H.I, *Sistem Politik Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm 103.

⁴ Eko Handoyo, Puji Lestari, *Pendidikan Politik*, (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2017), hlm

meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Tujuan dari adanya pendidikan politik secara umum disuatu negara adalah untuk mempersiapkan generasi penerus sebagai penerima dan pelanjut sistem nilai (sistem politik, pola keyakinan, sistem budaya), menyamakan sistem berfikir tentang nilai-nilai yang dapat mendominasi aktivitas kehidupan bernegara, memantapkan sikap jiwa dalam melaksanakan sistem nilai sekaligus membangun hasrat melestarikannya.⁵

Pendidikan politik tidak hanya ditujukan agar warga negara melek politik dengan mengetahui konsep-konsep dan teori politik sebab yang dituju oleh pendidikan politik bukanlah membentuk para ahli ilmu politik tetapi membina warga negara agar sadar dan peduli terhadap peristiwa politik yang terjadi baik dalam konteks masyarakat maupun negara, diwujudkan melalui partisipasinya dalam proses politik tersebut. Terkait dengan beberapa pihak yang memiliki kewajiban yuridis maupun moral dalam melakukan Pendidikan politik kepada warga negara, beberapa peraturan perundang-undangan telah mengaturnya. Salah satunya dibebankan kepada partai politik.⁶

Partai politik memiliki fungsi yang diatur dalam Pasal 11 Ayat (1a-1e) UU Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik yaitu: a. pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan

⁵ Sahya Anggara, *Sistem Politik Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 102.

⁶ Hariyanti, "Peranan Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Kader Perempuan Melalui Pendidikan Politik (Studi Deskriptif Pada Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi Sumatera Barat)", *Tesis*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2018), hlm. 2.

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, b. penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk menyejahterakan masyarakat, c. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara, d. partisipasi politik warga negara, dan e. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.⁷

Partai Politik menurut Miriam Budiharjo adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Menurutnya di negara demokratis partai berfungsi sebagai sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik dan sebagai sarana pengatur konflik.⁸ Adapun pengertian lain mengenai partai politik didalam Undang-Undang partai politik yaitu organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁹

Sebagai contoh, perayaan Pemilu di Kabupaten Purbalingga diikuti oleh banyak partai politik. Partai Politik tersebut diantaranya adalah PDI-P,

⁷ Pasal 11 Ayat (1a), (1b), (1c), (1d), (1e) UU Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik.

⁸ Miriam Budiharjo, *Dasar-Dasar*: 403-409.

⁹ Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 2 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.

Golkar, Demokrat, Gerindra, Hanura, Nasdem, dan masih banyak lagi. Ada juga partai politik Islam atau partai yang menggunakan label Islam tetapi perjuangan sebenarnya adalah terutama untuk kepentingan umat Islam tanpa mengesampingkan kepentingan non-Muslim, atau tidak menggunakan label Islam, programnya juga untuk kepentingan semua penduduk tetapi konstituen utamanya berasal dari umat Islam seperti PPP, PBB, PKS, PKB, PAN.¹⁰

Penulis menggolongkan partai politik kedalam tiga golongan berdasarkan kepentingannya. Golongan tersebut meliputi:¹¹

- Golongan formalis yang memilih menghendaki Islam dijadikan ideologi partai secara resmi. Mereka memperjuangkan nilai-nilai Islam melalui jalur politik dan berpartisipasi dalam Pemilu. Kategori ini diwakili oleh partai-partai berideologi Islam antara lain PPP, PBB, dan PKS.
- Golongan substansialis yang menjadikan nilai-nilai Islam sebagai substansi kehidupan sosial politik, tetapi menolak formalisasi Islam pada negara dan pemerintahan. Pada ranah partai politik mereka diwakili oleh PAN dan PKB.
- Golongan sekuler yang menolak inklusi agama (Islam) dalam kehidupan negara dan sistem pemerintahan, serta berupaya memisahkan domain negara dari agama. Mereka menganggap adopsi agama dalam kehidupan politik dan pemerintahan tidak hanya menggerus kualitas kehidupan bernegara, tetapi juga akan menurunkan makna beragama bagi warganya.

¹⁰ Ari Ganjar Herdiansah, "Pragmatisme Partai Islam Di Indonesia: Pendekatan Tindakan Sosial", *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, edisi I, 02 Juni tahun 2017, hlm. 159, <https://www.researchgate.net/>, diakses 30 Agustus 2020.

¹¹ Ari Ganjar Herdiansah, "Pragmatisme Partai Islam Di Indonesia: Pendekatan Tindakan Sosial". *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*. Vol. I, no. 2, 2017, 159.

Yang termasuk dalam golongan ini adalah partai politik selain golongan formalis dan substansialis.

Sementara Yulianto membagi entitas partai Islam kedalam dua konsepsi. Pertama, partai yang memiliki asas kepartaian Islam dengan kepemimpinan dibawah kendali orang-orang yang tidak diragukan keislamannya dan mengusung simbol-simbol keislaman dari tanda sampai ke jargon-jargon politik. Partai-partai yang teridentifikasi dengan karakteristik tersebut antara lain PPP, PBB, dan PKS. Kedua, partai yang secara asas, simbol, jargon, dan perilaku keseharian amat jauh dari warna Islam tetapi secara kepemimpinan dibawah kendali orang-orang beridentitas keislaman. Pengikut utama partai-partai tersebut biasanya berasal dari umat Islam dan ormas keagamaan tertentu, seperti yang ditunjukkan oleh PKB dan PAN.¹²

Semua partai politik baik partai nasionalis maupun partai Islam sudah semestinya melakukan pendidikan politik karena sesuai dengan kewajiban partai yang tertera dalam Pasal 13 a-k UU Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik. Pendidikan politik dibiayai oleh APBD yang dialokasikan untuk dana BANPOL (Bantuan politik) melalui partai politik seperti yang diatur dalam Pasal 9 Ayat (1), (2), dan (3) PP Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sehingga diharapkan

¹² Ari Ganjar Herdiansah, *Pragmatisme Partai*: 160.

partisipasi politik masyarakat dapat meningkat dengan dilaksanakannya pendidikan politik.¹³

Pada faktanya, partisipasi politik masyarakat terhadap partai politik Islam cenderung masih kurang jika dibandingkan dengan partai politik nasionalis. Sebagai contoh berdasarkan data yang diperoleh dari KPU Kabupaten Purbalingga, pelaksanaan Pemilu legislatif tiga periode terakhir, partai politik Islam selalu kalah dalam lima Dapil (Daerah Pilihan). Pada Pemilu legislatif 2009 yang mendapatkan suara terbanyak dari total 4 dapil adalah PDI-P dengan total 116.328 suara. Peringkat kedua Golkar dengan total 62.368 suara dan peringkat ketiga adalah Demokrat dengan total 52.275 suara. Sedangkan partai politik Islam PAN menduduki peringkat keempat dengan total 35.263 suara, PKB peringkat kelima dengan total 34.183 suara, PKS peringkat keenam dengan total 33.777 suara, PPP peringkat ketujuh dengan total 19.547 suara dan PBB peringkat kedelapan belas dengan total 1.499 suara. Begitu pula pada pemilu legislatif 2014, PDI-P masih menduduki posisi pertama pada empat dapil dengan total 119.363 suara. Peringkat kedua Golkar dengan total 74.759 suara dan peringkat ketiga adalah Gerindra dengan total 68.763 suara. Sedangkan partai politik Islam PKB menduduki peringkat keempat dengan total 56.388 suara, PKS peringkat kelima dengan total 38.580 suara, PAN peringkat keenam dengan total 33.699 suara, PPP peringkat kedelapan dengan total 28.396 suara dan PBB peringkat kesebelas belas dengan total 1.825 suara. Pada Pemilu legislatif

¹³ Wawancara dengan Ibu Nurul Hidayah Supriyati, Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah partai PPP, pada Jum'at 17 Juni 2020, jam 10.00, di Rumah Ibu Nurul.

2019 PDI-P masih mendominasi empat dapil dengan total 120.717 suara. Sedangkan peringkat kedua diperoleh PKB dengan total suara 92.541 suara. Peringkat ketiga yaitu Gerindra dengan total 77.755. Partai politik Islam PKS menempati posisi kelima dengan total 36.594 suara. PAN peringkat keenam dengan 34.159 suara. PPP berada di peringkat kedelapan dengan total 23.813 suara. Sedangkan PBB berada di peringkat ketiga belas dengan total 2.154 suara.¹⁴

Berdasarkan data perolehan suara pada Pemilu legislatif, secara umum perolehan suara partai politik Islam di Purbalingga masih kalah dibanding dengan partai politik nasionalis terutama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sehingga partai-partai Islam di Purbalingga harus berusaha lebih keras untuk pengoptimalan suara melalui pendidikan politik pada Pemilu yang akan datang, terutama pada pemilu 2024. Jika melihat data, penduduk Purbalingga yang beragama Islam sebanyak 943.010 jiwa¹⁵ dari keseluruhan jumlah penduduk yang ada yaitu sebanyak 1.003.246 jiwa.¹⁶ Kekalahan partai politik Islam dalam Pemilu legislatif 2009, 2014, dan 2019 disebabkan karena pelaksanaan partisipasi politik yang sehat masih terancam dengan maraknya penggunaan politik uang (*money politic*) dalam mempengaruhi proses pemilihan seseorang. Begitu pula adanya dugaan

¹⁴ Ringkasan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tingkat Kabupaten Purbalingga Tahun 2009, 2014, dan 2019.

¹⁵ Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, "Profil Perkembangan Kependudukan Tahun 2016 Kabupaten Purbalingga", <https://dinpendukcapil.purbalinggakab.go.id/>, diakses 8 September 2020.

¹⁶ Tabel Jumlah Penduduk Kabupaten Purbalingga Tahun 2019, Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga.

permasalahan terkait proses mobilisasi massa didaerah-daerah terpencil yang masih terkendala akses informasi maupun netralitas proses pengawasan.

Berkaitan dengan pendidikan politik, tingkatan pemilih yang menjadi sasaran dalam pelaksanaan sosialisasi pemilihan oleh KPU atau pendidikan politik oleh partai politik meliputi komponen keluarga, pemilih pemula, pemilih pemuda, pemilih perempuan, pemilih penyandang disabilitas, pemilih berkebutuhan khusus, kaum marjinal, komunitas, keagamaan, relawan demokrasi, dan warga internet (netizen).¹⁷ Salah satu komponen yang ada dalam BAB II Pasal 4 ayat (1a) PKPU Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/ Atau Walikota Dan Wakil Walikota adalah pemilih pemula. Pemilih pemula adalah pelajar atau remaja yang merupakan sebuah komunitas cukup besar dan cukup diperhitungkan sebagai basis suara pada setiap Pemilu. Komunitas pelajar yang baru pertama kali mengikuti pemilihan umum disebut pemilih pemula atau pemilih yang baru pertama kali memilih karena usia mereka baru memasuki usia pemilih. Pemilih pemula usia Sekolah Menengah Atas (SMA) memang menjadi segmen yang unik, seringkali memunculkan kejutan dan tentu saja menjanjikan secara kuantitas. Disebut unik, sebab perilaku pemilih pemula dengan antusiasme yang tinggi sementara keputusan pilihan yang belum bulat.

¹⁷ BAB II Pasal 4 ayat (1a) PKPU Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan / Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

Pemilih pemula bisa ditempatkan sebagai *swing voters* yang sesungguhnya. Pilihan politik mereka belum dipengaruhi motivasi ideologis tertentu dan lebih didorong oleh konteks dinamika lingkungan politik lokal. Pemilih pemula mudah dipengaruhi kepentingan-kepentingan tertentu, terutama oleh orang terdekat seperti anggota keluarga, mulai dari orangtua hingga kerabat.¹⁸ Terlebih lagi pemilih pemula belum menganggap penting adanya pemilu karena menurut mereka, pemilu tidak memberikan perubahan pasti bagi mereka.¹⁹ Selain itu pemilih pemula belum paham dengan visi misi calon yang mengikuti pemilu. Kondisi tersebut tampak jika melihat perilaku pemilih pemula pada beberapa penyelenggaraan Pemilu.

Dikalangan pemilih pemula, partisipasi politik masih rendah sehingga harus menjadi perhatian khusus melalui pendidikan politik. Maka, pendidikan politik itu sangat penting dengan berlandaskan pada Pasal 31 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik bahwasanya fungsi partai politik untuk memberikan pendidikan politik, diantaranya untuk meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, untuk meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta untuk meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan

¹⁸ Fety Novianty, "Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Menumbuhkan Partisipasi Politik Bagi Pemilih Pemula Di Kecamatan Pontianak Barat", *SOSIAL HORIZON: Jurnal Pendidikan Sosial*, Vol. 5, No. 2, (Desember 2018): 294.

¹⁹ Dita Angga, "Ini Penyebab Pemilih Pemula Golput", *www.nasional.sindonews.com.*, diakses pada 11 Desember 2019.

kesatuan negara.²⁰ Serta Inpres No. 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan politik adalah memberikan pedoman kepada generasi muda Indonesia guna meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pemilih pemula yang notabenehnya pelajar atau remaja merupakan sebuah komunitas yang cukup besar dan cukup diperhitungkan sebagai basis suara pada setiap pemilu. Di Kabupaten Purbalingga yang rentan usianya masuk dalam golongan pemilih pemula sebanyak 74.512 jiwa.²¹ Dengan banyaknya jumlah pemilih pemula, diharapkan peran partai politik khususnya partai politik Islam dapat lebih rutin melakukan pendidikan politik bagi pemilih pemula di Kabupaten Purbalingga karena pemilih pemula berjumlah sekitar 30% dan sangat berpengaruh dalam jumlah perhitungan suara dalam Pemilu.²²

Di Kabupaten Purbalingga partisipasi politik pemilih pemula mengalami penurunan. Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di Kantor KPU Kabupaten Purbalingga, pada pemilu 2009 hingga pemilu 2019, persentase partisipasi politik pemilih pemula mengalami penurunan yang signifikan. Pemilu 2009 jumlah pemilih pemula sebanyak 15.810 atau sebesar 2,32% dari jumlah DPT yang ada yaitu 680,641 jiwa. Pada Pemilu 2014 prosentase pemilih pemula hanya sebesar 2,28% dari jumlah DPT yang ada

²⁰ Pasal 31 UU Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana dirubah oleh UU Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik.

²¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga, *Kabupaten Purbalingga dalam Angka Purbalingga Regency in Figures 2019* (Purbalingga: Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga, 2019), hlm.69

²² Dinkominfo, "KPUD Purbalingga Garap Pemilih Pemula", <https://www.purbalinggakab.go.id/>, diakses pada 14 Februari 2020.

yaitu 727,777 jiwa, dan pada Pemilu 2019 partisipasi politik pemilih pemula tercatat sebesar 2,05% dari jumlah DPT yang ada yaitu 752,221 jiwa.²³

Berdasarkan penurunan partisipasi politik pemilih pemula, pendidikan politik perlu diberikan kepada generasi muda, mengingat kondisi masyarakat yang beranekaragam, banyak diantaranya yang masih berada pada keterbelakangan dan ketidaktahuan politis serta pendidikan tersebut diperlukan untuk merangsang partisipasi aktif rakyat dalam gerak pembangunan.²⁴ Dari sini lah penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “Pendidikan Politik Oleh Partai Politik Islam Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Kabupaten Purbalingga”.

B. Definisi Operasional

Dalam penelitian kali ini, peneliti akan menjelaskan beberapa definisi operasional yang terdapat pada tulisan ini, yaitu:

1. Pendidikan politik merupakan aktifitas yang bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan orientasi-orientasi politik pada individu. Pendidikan politik yaitu untuk meningkatkan pengetahuan rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Sesuai paham kedaulatan rakyat atau demokrasi, rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi.²⁵ Menurut Rusadi Kantaprawira, pendidikan politik yaitu untuk meningkatkan pengetahuan rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara

²³ Data Rekap Pemilih Pemula dan Pemilih Muda KPU Kabupaten Purbalingga Periode 2005-2019.

²⁴ Eko Handoyo, Puji Lestari, *Pendidikan Politik*: 12-13.

²⁵ Masriyani, Herma Yanti, “Fungsi Partai Politik dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat”, *Jurnal Wajah Hukum*, Vol 3 Nomor 1, t.t., hlm 105.

maksimal dalam sistem politiknya sesuai paham kedaulatan rakyat atau demokrasi, rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi.²⁶

2. Partai Politik Islam adalah partai yang menggunakan label Islam tetapi perjuangan sebenarnya adalah terutama untuk kepentingan umat Islam tanpa mengesampingkan kepentingan non-Muslim, atau tidak menggunakan label Islam, programnya juga untuk kepentingan semua penduduk tetapi konstituen utamanya berasal dari umat Islam seperti PPP, PBB, PKS, PKB, PAN. Dalam penelitian ini, yang dimaksud partai politik Islam seperti yang telah penulis uraikan dalam latar belakang masalah, merupakan partai yang masuk dalam golongan formalis yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
3. Partai Politik Nasionalis atau partai golongan sekuler adalah partai yang menolak inklusi agama (Islam) dalam kehidupan negara dan sistem pemerintahan, serta berupaya memisahkan domain negara dari agama. Mereka menganggap adopsi agama dalam kehidupan politik dan pemerintahan tidak hanya menggerus kualitas kehidupan bernegara, tetapi juga akan menurunkan makna beragama bagi warganya. Dalam hal ini adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golongan Karya (GOLKAR), Partai Demokrat, Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), dan lain-lain.

²⁶ Alex Victor Wanma, "Pentingnya Pendidikan Politik Generasi Muda Terhadap Pelaksanaan Partisipasi Politik Di Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor", <https://media.neliti.com/>, diakses pada 20 Juli 2020.

4. Partisipasi Politik adalah keikutsertaan warga negara biasa (yang tidak mempunyai kewenangan) dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik berupa kebijakan publik.²⁷
5. Pemilih Pemula adalah pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.²⁸ Dalam hal ini maksud penulis yaitu mereka yang baru pertama kali untuk memilih dan telah berusia 17 tahun.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendidikan politik partai politik Islam di Kabupaten Purbalingga?
2. Bagaimana upaya partai politik Islam di Kabupaten Purbalingga dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula melalui pendidikan politik?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui proses pendidikan politik yang dilakukan partai politik Islam di Kabupaten Purbalingga.

²⁷ Jacobus Ranjabar, *Pengantar ilmu politik dari ilmu politik sampai politik di era globalisasi*, (Bandung: Alfabeta 2016), hlm. 230.

²⁸ BAB I Pasal 1 Ayat (34) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

- b. Untuk mengetahui sejauh mana peranan Partai politik Islam dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula di Kabupaten Purbalingga melalui pendidikan politik.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Memperluas dan memperkaya pengetahuan tentang pendidikan politik oleh partai politik Islam dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula. Serta menjadi sarana penyaluran ilmu-ilmu yang diperoleh peneliti selama kuliah

b. Manfaat Praktis

Dapat memahami masyarakat mengenai pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik Islam dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula yang ada di Kabupaten Purbalingga, dapat memberikan pemahaman maupun menumbuhkan kesadaran berpolitik masyarakat melalui pendidikan politik, serta dapat mengkritisi partai politik Islam dalam hal Pendidikan politik yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan penulis, sudah ada karya tulis yang berbentuk skripsi, tesis, buku, majalah, artikel, jurnal dan sebagainya. Tetapi Sejauh ini belum ada karya tulis yang meninjau

mengenai “Pendidikan Politik Oleh Partai Politik Islam dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Kabupaten Purbalingga”. Hingga saat ini yang ada hanya beberapa skripsi, tesis, dan jurnal yang membahas dari segi aspek atau sudut pembahasan yang berbeda. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penelitian ini:

1. Kamaluddin dalam skripsinya yang berjudul “Pendidikan Politik Hubungannya dengan Partisipasi Politik Masyarakat Desa Labuja Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros (Analisis Terhadap Pilkada Serentak Tahun 2015)”.²⁹ Penelitian ini memaparkan bahwa partisipasi pemilih di desa tersebut masih kurang baik dikarenakan kurangnya pemahaman warga desa tentang pendidikan pesta demokrasi melalui pemilu, Sehingga lebih memilih untuk golput. Pemilih di desa tersebut juga dipengaruhi jenis kelamin ekonomi sosial pendidikan, pekerjaan, kelas, pendapatan, dan agama. Persamaanya ada pada objek penelitian yaitu pendidikan politik yang berhubungan dengan partisipasi politik. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah Skripsi Kamaludin mengenai pendidikan politik yang berhubungan dengan partisipasi politik masyarakat. Sementara peneliti mengkaji tentang pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik Islam untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula. Serta subjek dalam skripsi Kamaludin adalah masyarakat Desa Labuja Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros bukan pengurus partai politik Islam.

²⁹ Kamaluddin, “Pendidikan Politik Hubungannya dengan Partisipasi Politik Masyarakat desa Labuja Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros (Analisis Terhadap Pilkada Serentak Tahun 2015)”, *Skripsi*. Makasar: Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar 2016.

2. Dwi Kharisma dalam tulisanya yang berjudul “Peran Pendidikan Politik terhadap Partisipasi Politik Pemilih Muda”.³⁰ Penelitian ini memaparkan bahwa belum berjalannya pendidikan politik menjadi salah satu kendala pemilih muda saat berpartisipasi pada pilihan legislatif 2014 di Kota Manado. Pemilih muda di Kota Manado tetap ikut serta dalam pilihan legislatif namun keikutsertaan mereka hanya bersifat konvensional, atau sekedar pemberian suara bukan karena atas pertimbangan yang matang sehingga para pemilih muda gampang terpengaruh oleh lingkungan sekitar, keluarga maupun mudah untuk dimobilisasi oleh kelompok-kelompok tertentu. Persamaan skripsi Dwi Kharisma dengan penelitian penulis terletak pada objek penelitian yaitu pendidikan politik. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah skripsi Dwi Kharisma tidak mengkaji Pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik Islam serta tidak mengkaji partisipasi politik pemilih pemula melainkan mengkaji tentang pemilih muda.
3. Riyan Feriyanto Efendi dalam Skripsinya yang berjudul “Relasi Antara Pendidikan Politik dan Partisipasi Politik (Studi Kasus Terhadap Rendahnya Partisipasi Politik Pemilih di Kecamatan Waru pada Pemilihan Bupati Sidoarjo Tahun 2015)”.³¹ Penelitian ini menjelaskan hubungan antara pendidikan politik dengan partisipasi politik. Riyan Feriyanto Efendi mengangkat tema ini dikarenakan rendahnya partisipasi politik di

³⁰ Dwira Kharisma, “Peran Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemuda”, *Skripsi*, Sulawesi Utara: Universitas Sam Ratulangi 2014.

³¹ Riyan Feriyanto Efendi, “Relasi Antara Pendidikan Politik dan Partisipasi Politik (Studi Kasus Terhadap Rendahnya Partisipasi Politik Pemilih di Kecamatan Waru pada Pemilihan Bupati Sidoarjo Tahun 2015)”, *Skripsi*, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 2019.

Kecamatan Waru pada pemilihan Bupati Sidoarjo tahun 2015 disebabkan oleh rendahnya pengetahuan masyarakat tentang partisipasi politik serta kurangnya kesadaran individu untuk memilih pemimpin. Persamaan Skripsi Riyan Feriyanto Efendi dengan penelitian penulis terletak pada Objek penelitian yaitu pendidikan politik. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah Skripsi milik Riyan Feriyanto Efendi membahas mengenai hubungan partisipasi politik dan pendidikan politik yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo sedangkan penelitian penulis membahas tentang pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik Islam dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mendapatkan adanya persamaan dan perbedaan antara skripsi penulis dan karya-karya terdahulu. Persamaan dan perbedaan tersebut antara lain:

Tabel 1
Persamaan dan Perbedaan Kajian Pustaka

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Kamaludin, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.	Pendidikan Politik Hubungannya dengan Partisipasi Politik Masyarakat Desa Labuja Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros (Analisis Terhadap Pilkada Serentak Tahun 2015)	Menganalisis objek yang sama yaitu Pendidikan politik. Menggunakan jenis penelitian <i>Field Research</i> .	Skripsi Kamaludin mengenai Pendidikan politik yang berhubungan dengan partisipasi politik masyarakat. Sementara peneliti mengkaji tentang pendidikan politik yang dilakukan partai politik Islam untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula.

			serta subjek dari skripsi Kamaludin adalah masyarakat Desa Labuja Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros bukan pengurus partai politik Islam.
Dwi Kharisma, Universitas Sam Ratulangi.	Peran Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemuda.	Menganalisis terkait permasalahan Pendidikan politik . Menggunakan jenis penelitian <i>Field Research</i> .	Tidak mengkaji Pendidikan politik yang dilakukan partai politik Islam serta tidak mengkaji partisipasi politik pemilih pemula melainkan pemilih muda.
Riyan Feriyanto Efendi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.	Relasi Antara Pendidikan Politik dan Partisipasi Politik (Studi Kasus Terhadap Rendahnya Partisipasi Politik Pemilih di Kecamatan Waru pada Pemilihan Bupati Sidoarjo Tahun 2015)	Membahas mengenai Pendidikan politik serta partisipasi politik Menggunakan jenis penelitian <i>Field Research</i> .	Skripsi milik Riyan Feriyanto Efendi membahas mengenai hubungan partisipasi politik dan pendidikan politik yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo Sedangkan penelitian penulis membahas tentang pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik Islam dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula di Kabupaten Purbalingga.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam memudahkan pembahasan dan pemahaman dalam penelitian ini, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, pada bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan kajian teori, pada bab ini penulis memaparkan landasan teori tentang pendidikan politik, partai politik Islam, dan partisipasi politik.

Bab III merupakan metode penelitian, dalam bab ini berisi tentang metode penelitian, jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data.

Bab IV merupakan hasil dan pembahasan, dalam bab ini berisi tentang pendidikan politik partai politik Islam di Kabupaten Purbalingga, serta upaya partai politik Islam dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula melalui Pendidikan politik.

Bab V merupakan penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Setelah melakukan pembahasan dan proses analisis pada penelitian skripsi ini, maka penulis mengambil simpulan sebagai berikut:

1. Pendidikan politik oleh partai politik Islam (PPP, PBB, dan PKS) di Kabupaten Purbalingga telah diberikan kepada kader, maupun kepada masyarakat umum secara rutin. Bentuk kegiatan yang dilakukan oleh partai politik Islam diantaranya yaitu pendidikan politik dasar, madya, dan lanjutan, pelatihan perawatan jenazah, pelatihan pra nikah, pelatihan berbasis IT, kegiatan tafsir asas, kegiatan sosial seperti bakti sosial dan operasi bedah minor yang bekerjasama dengan dokter yang ada di Purbalingga, dan kegiatan perekonomian melalui usaha pengelolaan ikan, Training Orientasi Partai dan Taklim Rutin Partai. Meskipun pendidikan politik sudah dilakukan, namun yang terjadi adalah partisipasi politik masyarakat masih rendah disebabkan masih maraknya praktik *money politic* yang dilakukan partai lainnya dan secara perlahan akan menggerus prinsip demokrasi itu sendiri, karena suara rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dapat ditebus dengan rupiah.
2. Dalam penelitian ini, partai politik Islam di Kabupaten Purbalingga memiliki upaya untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula melalui pendidikan politik yaitu berupa kegiatan yang menarik minat bakat pemilih pemula seperti pelatihan design grafis, pelatihan MS. Office,

kegiatan bidang olahraga, pecinta alam, masuk kedalam organisasi sayap partai, Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK), kegiatan motivasi belajar siswa.

B. SARAN

Dari hasil penelitian peneliti mengenai tema pendidikan politik partai politik Islam di wilayah Kabupaten Purbalingga, terdapat catatan untuk langkah partai politik Islam kedepan, antara lain sebagai berikut:

1. Kesadaran dan pemahaman individu terhadap partisipasi politik dibutuhkan demi memperkecil praktik *money politic* di kalangan masyarakat. Diharapkan partai politik Islam memiliki pedoman pelaksanaan pendidikan politik sehingga dapat memberikan pendidikan politik dengan lebih intensif dan terarah kepada masyarakat agar pikiran masyarakat lebih terbuka. Sehingga ketika ada pemilihan umum, masyarakat akan mencoblos sesuai apa yang dikehendaki, atas kesadaran sendiri bukan karena pengaruh pihak lain. Partai politik Islam juga harus lebih matang dalam menyiapkan kadernya untuk memberikan pendidikan politik sesuai tugasnya kepada masyarakat.
2. Partai politik Islam di Kabupaten Purbalingga harus lebih serius dalam melakukan pendidikan politik kepada pemilih pemula. Untuk menarik minat para pemilih pemula, pendidikan politik yang dilakukan juga harus inovatif mengikuti perkembangan teknologi dan jaman. Selain itu partai politik Islam dapat melakukan pendekatan cultural masyarakat sekitar.

Serta untuk meningkatkan suara partai, partai politik Islam dapat berkolaborasi dengan partai nasionalis dalam kontestasi pemilihan umum. Dengan demikian diharapkan pendidikan politik dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman pemilih pemula dalam berpolitik sehingga mampu meningkatkan partisipasi politik.



DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Idrus, Karim Suryadi. Modul 1 Teori dan Konsep Dalam Konteks Pendidikan Politik. <http://repository.ut.ac.id/>., diakses 1 Oktober 2020.
- Akbar, Abdi, dkk., *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Partisipasi Masyarakat*, Jakarta: BAWASLU, 2019.
- Al-Qur'an Kemenag RI, Tim penterjemah, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2006.
- Angga, Dita, "Ini Penyebab Pemilih Pemula Golput", www.nasional.sindonews.com., diakses pada 11 Desember 2019.
- Anggara, Sahya. *Sistem Politik Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga, *Kabupaten Purbalingga dalam Angka Purbalingga Regency in Figures 2019*, Purbalingga: Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga, 2019.
- Budirjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Data Rekap Pemilih Pemula dan Pemilih Muda KPU Kabupaten Purbalingga Periode 2005-2019.
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, "Profil Perkembangan Kependudukan Tahun 2016 Kabupaten Purbalingga", <https://dinpendukcapil.purbalinggakab.go.id/>, diakses 8 September 2020.
- Dinkominfo, "KPUD Purbalingga Garap Pemilih Pemula", <https://www.purbalinggakab.go.id/>., diakses pada 14 Februari 2020.
- Djazuli, H.A., *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Erfandi, *Parliamentary Threshold dan HAM Dalam Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Seatara Press, 2014.
- Feriyanto Efendi, Riyan, "Relasi Antara Pendidikan Politik dan Partisipasi Politik (Studi Kasus Terhadap Rendahnya Partisipasi Politik Pemilih di Kecamatan Waru pada Pemilihan Bupati Sidoarjo Tahun 2015)", *Skripsi*, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 2019.

- Ganjar Herdiansah, Ari, "Pragmatisme Partai Islam Di Indonesia: Pendekatan Tindakan Sosial". *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*. Vol. I, no. 2, 2017.
- Gusmansyah, Weri. Fungsi Partai Politik dalam Pendidikan Politik Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dan Hukum Islam, *Al Ijarah Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol 4 Nomor 2, 2019
- Handoyo, Eko, Puji Lestari, *Pendidikan Politik*. Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2017.
- Hariyanti, "Peranan Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Kader Perempuan Melalui Pendidikan Politik (Studi Deskriptif Pada Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi Sumatera Barat)", *Tesis*, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2018
- J. Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Refisi*, Bandung: Rosdakarya, 2009.
- Kamaluddin, "Pendidikan Politik Hubungannya dengan Partisipasi Politik Masyarakat desa Labuja Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros (Analisis Terhadap Pilkada Serentak Tahun 2015)", *Skripsi*. Makasar: Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar 2016.
- Kharisma, Dwira. "Peran Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemuda", *Skripsi*. Sulawesi Utara: Universitas Sam Ratulangi 2014.
- Kuswanto, *Konstitusionalitas Penyederhanaan Partai Politik*. Malang: Setia Press, 2016.
- Masriyani, dan Herma Yanti. Fungsi Partai Politik dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat, *Jurnal Wajah Hukum*, Vol III, no. 1, t.t.
- Muin Salim, Abdul, *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam al-Qur'an*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Novianty, Fety, "Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Menumbuhkan Partisipasi Politik Bagi Pemilih Pemula Di Kecamatan Pontianak Barat", *SOSIAL HORIZON: Jurnal Pendidikan Sosial*, Vol. 5, No. 2, Desember 2018.
- Nur Andriyan, Dody. *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik Kombinasi Presidensial Dengan Multi Partai di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Nurhadi, "Tematik Ayat Ayat Pendidikan Politik Dalam Al-Qur'an", *Jurnal Edukasi dan Sains*, Vol 2 Nomor 1, 2020.

- Partai Bulan Bintang, “Sekilas Partai Bulan Bintang”, <https://partaibulanbintang.or.id/>., diakses pada 20 November 2020.
- Partai Bulan Bintang, “Visi & Misi Partai Bulan Bintang”, <https://partaibulanbintang.or.id/>., diakses pada 20 November 2020.
- Partai Keadilan Sejahtera, “Sejarah Ringkas”, <https://pks.id/>., diakses pada 10 Desember 2020.
- Partai Keadilan Sejahtera, “Visi Misi”, <https://pks.id/>., diakses pada 10 Desember 2020.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan / Atau Walikota Dan Wakil Walikota.
- Raco, J.R., *Metodologi Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, 2010.
- Rahman H.I, A. *Sistem Politik Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Rahman, Asmika, “Konsep Dasar Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Melalui Pendidikan Kewarganegaraan”, *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol 10 Nomor 1, 2018.
- Ranjabar, Jacobus, *Pengantar ilmu politik dari ilmu politik sampai politik di era globalisasi*, Bandung: Alfabeta 2016.
- Ringkasan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tingkat Kabupaten Purbalingga Tahun 2009, 2014, dan 2019.
- Robbani Sukmana, Fathin. Pendidikan Politik Berkelanjutan, Ikhtiar Penyadaran Warga, <https://republika.co.id/>, diakses pada 20 Oktober 2020.
- Romli, Lili, “Partai Islam dan Pemilu”, <http://repository.radenintan.ac.id/>., diakses 10 Oktober 2020.
- Saputra, Rezeky, “Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Presiden di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2014”, *JOM FISIP*, Vol. 4, No. 1, Februari 2017
- Setiawan, Ebta, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Online (KBBI Online) arti Partisipasi”, <https://kbbi.web.id/partisipasi>, diakses pada 5 September 2020.

- Setiawan, Ebta, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Online (KBBI Online) arti Politik", <https://kbbi.web.id/politik>, diakses pada 5 September 2020.
- Sugiyono, *Metode penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sunaryo, Agus, dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, t.k.: t.p., t.t.
- Supriyanto, Andri, "Peran Pemilih Pemula Dalam Pilbup Purbalingga 2020." Webinar Peran Pemilih Pemula Dalam Pilbup Purbalingga 2020. Diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Purbalingga, 30 Agustus 2020.
- Suranto, dkk., "Laporan Hasil Penelitian Pemetaan Fktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Pemilih di Kabupaten Bantul", <http://repository.umy.ac.id/>., diakses 30 Desember 2020.
- Tabel Jumlah Penduduk Kabupaten Purbalingga Tahun 2019, Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Victor Wanma, Alex, "Pentingnya Pendidikan Politik Generasi Muda Terhadap Pelaksanaan Partisipasi Politik Di Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor", <https://media.neliti.com/>., diakses pada 20 Juli 2020.
- Wawancara dengan Bapak Guruh Nur Markhaban, Ketua DPC partai PBB Kabupaten Purbalingga, pada Rabu 25 November 2020, di Kantor DPC PBB Purbalingga.
- Wawancara dengan Bapak Guruh Nur Markhaban, Ketua DPC partai PBB Kabupaten Purbalingga, pada Jumat 17 Juli 2020, di Kantor DPC PBB Purbalingga.
- Wawancara dengan Bapak Miharso, sejarawan DPC PPP Kabupaten Purbalingga, pada Senin, 21 Desember 2020, di Rumah Bapak Miharso.
- Wawancara dengan Bapak Taryo, sekretaris bidang pembangunan ummat DPD partai PKS Kabupaten Purbalingga, pada Kamis 10 Desember 2020, di Rumah Bapak Taryo.

Wawancara dengan Bapak Taryo, sekretaris bidang pembangunan umat DPD partai PKS Kabupaten Purbalingga, pada Jumat 17 Juli 2020, di Rumah Bapak Taryo.

Wawancara dengan Ibu Nurul Hidayah Supriyati, Ketua DPC partai PPP Kabupaten Purbalingga, pada Jumat 17 Juli 2020, di Kantor DPC PPP Purbalingga.

